



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **74.2** dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	30	27.5	91.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	21.4	21.6	72.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	9	9.6	64.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21.5	15.5	62.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	81.9	74.2	
Predikat SAKIP		A	BB	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

belum mengunggah dokumen : DPA dan Renaksi

belum diunggah catatan notulensi rapat pembahasan dokumen perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah

2.) Pengukuran Kinerja

Lengkapi dengan notulen

Sesuaikan Bukti Dukung, Bukti dukung belum mencantumkan target renstra (2024-2026) / Kondisi Akhir Renstra

lengkapi dengan rapor kinerja

3.) Pelaporan Kinerja

agar bisa di satukan permasalahan yang ada di pertanian, perikanan dan ketahanan pangan dalam menjawab setiap eviden

agar di sesuaikan dengan penyesuaian laporan kinerja dengan realisasi

4.) Evaluasi Internal

4.a Tandatangani , tanggal tidak terlihat.

4.a Belum dibuat laporan monev rencana aksi TL LHE Akip yang sudah di tandatangan dan cap.

4.b SK Tim Sakip tidak sesuai dengan standar bukti dukung.

4.c Kesimpulan tidak memuat berapa persen rekomendasi yang sudah di tindaklanjuti.

4.c Belum ada capture gambar perbandingan nilai Sakip perangkat daerah n-2 dan n-1 untuk melihat kenaikan Sakip sebagai hasil dari Tindaklanjuti rekomendasi Sakip.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

agar segera mengunggah dokumen : DPA dan Renaksi

agar diunggah catatan notulensi rapat pembahasan dokumen perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

segera Lengkapi dengan notulen

segera lengkapi sesuai dengan catatan

lengkapi dengan rapor kinerja

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

mengirimkan seluruh eviden dari setiap faktor keberhasilan dan hambatannya

agar diperbaiki

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Agar melengkapi dan membuat :

4.a Tandatangan , tanggal dan cap.

4.a Laporan monev rencana aksi TL LHE Akip yang sudah di tandatangan dan cap.

4.b SK Tim Sakip harus sesuai dengan standar bukti dukung.

4.c Kesimpulan harus memuat berapa persen rekomendasi yang sudah di tindaklanjuti.

4.c Harus ada capture gambar perbandingan nilai Sakip perangkat daerah n-2 dan n-1 untuk melihat kenaikan Sakip sebagai hasil dari Tindaklanjuti rekom Sakip.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka